

Mahfudz Abdurrahman: Dari Nomaden Hingga Kancah Politik Nasional

Updates. - WARTAWAN.ORG

Jun 18, 2025 - 11:51

Image not found or type unknown



POLITISI - Mahfudz Abdurrahman, seorang politikus kawakan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), memiliki perjalanan hidup yang penuh warna sebelum menjakkan kaki di kancah politik nasional. Lahir pada 18 Juni 1958, sosoknya kini dikenal sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk tiga periode berturut-turut: 2009-2014, 2014-2019, dan 2019-2024. Daerah pemilihannya mencakup wilayah strategis Jawa Barat VI, meliputi Kota Bekasi dan Kota Depok. Lebih dari itu, rekam jejaknya di PKS juga gemilang, memegang amanah sebagai Bendahara Umum partai sejak tahun 2005 hingga 2025.

Masa kecil Mahfudz Abdurrahman diwarnai dengan mobilitas tinggi. Sebagai anak Betawi, ia menghabiskan tahun-tahun sekolah dasarnya hingga SMP di Cirebon. Pendidikan keagamaannya ditempa di Pesantren Raudhatul Tholibin, Babakan, Cirebon. Perjalanan hidupnya kemudian membawanya hijrah ke Kota Jambi untuk menyelesaikan pendidikan menengah atas, sebelum akhirnya kembali ke Jakarta demi menimba ilmu di Akademi Kepemimpinan Niaga Universitas Jayabaya, lulus pada tahun 1982.

Sebelum terjun ke dunia politik, Mahfudz Abdurrahman telah menorehkan jejak di berbagai sektor. Ia tak gentar merintis berbagai usaha, mulai dari percetakan, penerbitan, hingga toko buku. Pengalaman ini membawanya merambah dunia konstruksi dan properti, bahkan sempat menjabat sebagai Wakil Sekretaris Real Estate Indonesia Provinsi Banten di awal tahun 2000-an. Namun, semangatnya tak berhenti di situ. Ia kemudian beralih merambah sektor agrobisnis dan energi, menunjukkan kegigihannya dalam mencari peluang dan tantangan baru.

Bekal spiritual dari masa pesantren membentuk kepedulian sosialnya yang mendalam. Mahfudz Abdurrahman aktif dalam berbagai kegiatan dakwah, salah satunya dengan mendirikan yayasan Islamic Center Iqro di kawasan Pondok Gede bersama almarhum Ustad KH. Rahmat Abdullah. Di yayasan tersebut, ia didapuk sebagai Ketua Dewan Pembina. Kiprahnya di bidang sosial juga terlihat melalui perannya sebagai Ketua BPH Yayasan Al Hasan di Bekasi, Bendahara Yayasan Al Insan Jakarta, serta sebagai Pendiri LAZ TAMU (Lembaga Amil Zakat Tabung Amanah Ummat) Bekasi. Tak hanya itu, ia juga berkontribusi di masyarakat sebagai Wakil Ketua Bidang Peternakan HIKTI. Pengalamannya organisasinya sejak tahun 1980-an, mulai dari memimpin majalah kampus, menjadi Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM), Ketua Komisariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), hingga Bendahara Ikatan Penulis dan Wartawan Muda Islam, menjadi bekal berharga dalam memahami dinamika politik.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi rumah politik Mahfudz Abdurrahman. Dengan posisinya sebagai Bendahara Umum DPP PKS, ia dipercaya menjadi Calon Anggota Legislatif DPR RI untuk daerah pemilihan Jawa Barat VI. Hasil Pemilu 2009 membuktikan kepercayaan publik kepadanya, ia berhasil meraih 72.409 suara dan resmi menjadi Anggota DPR RI Komisi VI, yang membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM, BUMN, dan Badan Standardisasi Nasional untuk periode 2009-2014.

Kisah perjalanan politik Mahfudz Abdurrahman tak lepas dari momen penting

kelahiran Partai Keadilan (PK). Ia termasuk generasi awal yang turut memotori pembentukan partai ini pasca-reformasi 1998. Dalam sebuah musyawarah akbar aktivis dakwah di Jatiluhur pada tahun 1998, benih-benih Partai Keadilan mulai tumbuh. Partai ini kemudian resmi berdiri pada 20 Juli 1998, dan Mahfudz tercatat sebagai salah satu pendirinya bersama tokoh-tokoh terkemuka lainnya seperti Hidayat Nur Wahid, Luthfi Hasan Ishaq, Salim Segaf Al-Jufri, dan Nur Mahmudi Ismail.

Perjalannya di parlemen berlanjut. Pada Pemilu 2014, Mahfudz kembali terpilih sebagai Anggota DPR RI dari daerah pemilihan yang sama. Semangatnya tak surut, ia kembali dipercaya oleh konstituennya untuk mewakili daerah pemilihan Jawa Barat VI pada Pemilu 2019, melanjutkan kiprahnya di Senayan. Kini, ia kembali bertarung untuk Pemilu 2024, membuktikan konsistensinya dalam melayani masyarakat melalui jalur legislatif. ([PERS](#))